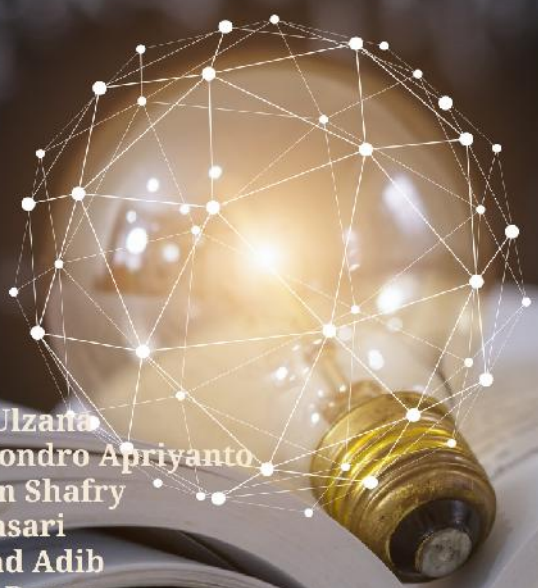


Revolusi Pendidikan: Membentuk Jiwa, Menata Masyarakat, Menjaga Pancasila

A glowing lightbulb with a network of white dots and lines overlaid on it, resting on an open book. The background is a blurred crowd of people.

**Yuhanita Ulzana
Sutrisno Condro Apriyanto
Moch Affan Shafry
Eka Mei Tasari
Muhammad Adib
Billa Putri Bunga
Kiki Hajriyani
Farah Maulida Amalia
Annisah Nurul Dzulaekha
Muhammad Andy Purnama
Nurul Arifah**

Melampaui Sekadar Mengajar: Pemikiran Kritis di Balik Pendidikan

Revolusi Pendidikan: Membentuk Jiwa, Menata Masyarakat, Menjaga Pancasila

Yuhanita Ulzana
Sutrisno Condro Apriyanto
Moch Affan Shafry
Eka Mei Tasari
Muhammad Adib
Billa Putri Bunga
Kiki Hajriyani
Farah Maulida Amalia
Annisah Nurul Dzulaekha
Muhammad Andy Purnama
Nurul Arifah



Revolusi Pendidikan: Membentuk Jiwa, Menata Masyarakat, Menjaga Pancasila

Penulis:

Yuhanita Ulzana
Sutrisno Condro Apriyanto
Moch Affan Shafry
Eka Mei Tasari
Muhammad Adib
Billa Putri Bunga

Kiki Hajriyani
Farah Maulida Amalia
Annisah Nurul Dzulaekha
Muhammad Andy Purnama
Nurul Arifah

Editor:

Assoc. Prof. Dr. Syahri, M.Si

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Juni 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Rafflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I - : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini yang berjudul Revolusi Pendidikan: Membentuk Jiwa, Menata Masyarakat, Menjaga Pancasila dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi intelektual dalam menggambarkan betapa pendidikan bukan hanya sebagai instrumen pengajaran formal, tetapi juga sebagai kekuatan transformasional yang mampu menggerakkan masyarakat, membentuk karakter bangsa, serta memperkuat nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Isi buku ini merupakan eksplorasi yang luas dan mendalam mengenai peran strategis pendidikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dimulai dari kaitan pendidikan dengan mobilitas sosial, fungsinya dalam struktur masyarakat, hingga penerapan demokrasi dalam sistem pendidikan. Tidak hanya itu, buku ini juga mengupas hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik, peran pendidikan nasional dalam pembentukan karakter bangsa, serta landasan filsafat pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

Buku ini disusun secara sistematis agar dapat diakses dengan mudah oleh para pembaca dari kalangan mahasiswa, pendidik, pemerhati pendidikan, hingga pengambil kebijakan. Diharapkan buku ini menjadi referensi yang kaya secara konsep dan relevan secara kontekstual, terutama

dalam menjawab tantangan pendidikan di era modern yang kompleks dan dinamis.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi-edisi berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
MOBILITAS SOSIAL DAN PENDIDIKAN	1
A. Konsep dan Klasifikasi Mobilitas Sosial	3
B. Pendidikan sebagai Saluran Mobilitas Sosial	5
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Sosial	7
D. Ketimpangan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial	9
E. Kebijakan Pendidikan dan Peranannya dalam Mobilitas Sosial	11
F. Peluang dan Strategi Mengoptimalkan Peran Pendidikan untuk Mobilitas Sosial	13
G. Daftar Pustaka	17
FUNGSI PENDIDIKAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	26
A. Fungsi Individual	28
B. Fungsi Sosial	29
C. Fungsi Ekonomi	31
D. Fungsi Politik	32
E. Tantangan dan Inovasi dalam Pendidikan	34
F. Daftar Pustaka	39
DEMOKRASI PENDIDIKAN	46
A. Prinsip Demokrasi Pendidikan	51
B. Bentuk Implementasi Demokrasi Dalam Pendidikan	53

C.	Tantangan Demokrasi Pendidikan	55
D.	Studi Kasus	57
E.	Daftar Pustaka	58

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK 71

A.	Definisi Pendidikan dan Perkembangan Peserta Didik	72
B.	Tujuan Pendidikan dalam Pengembangan Peserta didik	74
C.	Aspek Perkembangan Peserta Didik	76
D.	Aspek Kognitif	76
E.	Aspek Perkembangan Fisik	77
F.	Aspek Perkembangan Psikomotorik	77
G.	Aspek Perkembangan Emosional	78
H.	Aspek Perkembangan Sosial	78
I.	Aspek Perkembangan Moral	79
J.	Teori Perkembangan Peserta Didik	79
K.	Faktor Eksternal dalam Pengembangan Peserta Didik	82
L.	Implikasi Perkembangan Peserta Didik terhadap Pendidikan	85
M.	Tantangan Pendidikan dalam Mengembangkan Peserta Didik	86
N.	Daftar Pustaka	90

PENDIDIKAN NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA 103

A.	Pendidikan Nasional	108
B.	Pembentukan Karakter Bangsa	109
C.	Faktor-faktor Pembentukan Karakter Bangsa	110
D.	Daftar Pustaka	117

FILSAFAT PENDIDIKAN DAN NILAI- NILAI PANCASILA	127
A. Filsafat Pendidikan: Konsep dan Peranannya	132
B. Aliran utama filsafat pendidikan	138
C. Filsafat pendidikan Indonesia sebagai cerminan dari identitas bangsa	145
D. Relevansi nilai Pancasila terhadap dunia pendidikan	148
E. Integrasi Filsafat Pendidikan dan Nilai-Nilai Pancasila	154
F. Daftar Pustaka	160

Mobilitas Sosial dan Pendidikan

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa setiap orang menempati posisi sosial yang berbeda. Ada yang memiliki banyak kekayaan dan hidup berkecukupan, ada pula yang hidup dalam kekurangan dan berjuang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan [1]. Namun kondisi tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan situasi dan usaha. Perubahan yang terjadi tidaklah sama dan sangat bervariasi bagi tiap orang. Pergerakan atau perpindahan dari satu posisi sosial ke posisi lainnya inilah yang disebut sebagai mobilitas sosial. Konsep ini bicara tentang bagaimana seseorang atau kelompok bisa naik atau turun dalam struktur sosial [2]. Menariknya, pendidikan sering dianggap sebagai salah satu jalan untuk mendorong perubahan posisi ini. Banyak orang percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki nasib dan membuka peluang baru dalam hidup.

Pendidikan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya mobilitas sosial. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana pendidikan bisa menjadi alat yang mendorong seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, karena pendidikan mempunyai andil dalam memberikan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi seseorang untuk melakukan perubahan [3]. Oleh karena itu, pendidikan sering dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan ilmu yang dimiliki seseorang dapat mendapatkan pekerjaan yang Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang

layak karena banyak penyebab [4]. Hal tersebut terjadi antara lain karena faktor ekonomi, adat budaya, transportasi, dan paradigma masyarakat. Ada banyak faktor yang membuat sistem pendidikan kadang justru memperkuat ketimpangan sosial, bukannya mengurangnya [5].

Banyak keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Biaya sekolah, buku, seragam, dan berbagai kebutuhan pendidikan lainnya kerap menjadi beban yang sangat memberatkan bagi mereka [6]. Di samping itu, terdapat pula hambatan geografis, khususnya di daerah terpencil yang sulit diakses serta minimnya sarana transportasi dan keterbatasan fasilitas pendidikan menyebabkan anak-anak di wilayah tersebut terpaksa menghentikan pendidikan mereka atau hanya memperoleh pendidikan dalam jumlah yang sangat terbatas [7]. Selain itu, faktor budaya dan pandangan masyarakat turut berperan dalam membatasi akses terhadap pendidikan bagi perempuan masih dipandang kurang penting dibandingkan dengan laki-laki, sehingga banyak anak perempuan mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan mereka [8]. Pandangan masyarakat yang bersifat konservatif atau tradisional dapat menjadi penghalang bagi anak-anak dalam mendapatkan hak atas pendidikan yang setara. Situasi ini semakin memperkuat lingkaran ketimpangan sosial, karena anak-anak dari keluarga kurang mampu dan komunitas tertentu tidak memperoleh peluang yang setara untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan [9].

Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan terkadang justru memperdalam ketimpangan sosial, bukan mengurangnya [10]. Perbedaan akses terhadap pendidikan

menyebabkan kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Orang-orang yang memperoleh pendidikan berkualitas memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi dan status sosial yang lebih baik [11]. Sebaliknya, mereka yang aksesnya terbatas pada pendidikan berkualitas akan kesulitan keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan sosial. Kondisi ini berpotensi memperbesar jurang ketidaksetaraan di masyarakat serta menimbulkan berbagai masalah sosial lain, seperti pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan yang berkepanjangan [12].

A. Konsep dan Klasifikasi Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial merupakan sebuah proses sosial yang mencerminkan perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Mobilitas ini dapat berbentuk vertikal atau peningkatan (social climbing) maupun penurunan (social sinking) serta horizontal, di mana perpindahan posisi tidak disertai dengan perubahan status sosial secara signifikan [13]. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan individu atau kelompok ke posisi sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam struktur social [14]. Sebagai contoh dalam mobilitas vertikal ke atas yang terjadi saat seseorang dari latar belakang ekonomi rendah berhasil meraih kesuksesan sebagai pengusaha, pejabat, atau tokoh berpengaruh di masyarakat [15]. Sebaliknya, mobilitas vertikal ke bawah terjadi ketika seseorang mengalami penurunan status sosial akibat kehilangan pekerjaan, bangkrut, atau terlibat masalah hukum. Perubahan status ini umumnya diikuti oleh pergeseran dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan prestise social [2].

Mobilitas horizontal adalah pergerakan status, kelas, atau posisi sosial yang setara dalam tatanan sosial seperti seorang guru yang mengajar berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain tanpa perubahan dalam status atau fungsi, atau seorang pegawai yang berganti divisi dalam perusahaan yang sama tanpa mengalami peningkatan atau penurunan status [16]. Perpindahan semacam ini biasanya tidak memberikan pengaruh besar terhadap posisi sosial, tetapi tetap mencerminkan adanya dinamika dalam kehidupan sosial individu tersebut [17]. Mobilitas horizontal dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keinginan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang lebih kondusif, kebutuhan akan perubahan suasana, penyesuaian terhadap situasi keluarga, atau sebagai bagian dari strategi pribadi dalam merencanakan pengembangan karier [18]. Walaupun tidak membawa perubahan besar terhadap status sosial, jenis mobilitas ini tetap dapat berdampak pada aspek lain dalam kehidupan seseorang, seperti kualitas hubungan sosial, tingkat kenyamanan, serta efektivitas dan produktivitas dalam bekerja.

Berdasarkan dimensi waktunya secara sosiologis mengklasifikasikan mobilitas sosial ke dalam dua jenis utama, yaitu mobilitas antargenerasi dan intragenerasi. Mobilitas antar generasi mengacu pada pergeseran perubahan status sosial atau ekonomi yang terjadi antara generasi orang tua dan anak-anak mereka [19]. Berdasarkan penjelasan dari Science Direct dalam [20], mobilitas ini menggambarkan keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi orang tua dan kondisi serupa yang dialami oleh anak-anak mereka. Mobilitas antar generasi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar investasi orang tua dalam bidang pendidikan dan kesehatan anak, serta oleh bagaimana struktur pasar

kerja terbentuk dan berfungsi [21]. Mobilitas antar generasi merupakan salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana kesetaraan peluang tersedia dalam suatu Masyarakat, Dimana tingginya tingkat mobilitas antar generasi menunjukkan bahwa individu memiliki kesempatan untuk meraih status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi daripada orang tuanya melalui usaha sendiri, seperti menempuh pendidikan dan bekerja keras, tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi keluarga asal [22]. Sebaliknya, jika mobilitas antar generasi rendah, hal ini mencerminkan bahwa status sosial-ekonomi cenderung diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga memperkuat ketimpangan sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat [23]. Sedangkan mobilitas intragenerasi mengacu pada perubahan posisi sosial atau ekonomi yang dialami oleh seseorang sepanjang masa hidupnya [24]. Berbeda dengan mobilitas antar generasi yang membandingkan status sosial atau ekonomi antara orang tua dan anak, mobilitas intragenerasi lebih menyoroti pergerakan sosial-ekonomi yang terjadi dalam rentang hidup satu individu [25]. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana seseorang dapat mengalami peningkatan atau penurunan status sosial selama hidupnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

B. Pendidikan sebagai Saluran Mobilitas Sosial

Pendidikan sering kali diasumsikan sebagai jalan utama untuk meningkatkan status sosial individu maupun kelompok [26]. Dalam perspektif pembangunan, pendidikan formal berperan strategis sebagai medium untuk mentransformasikan struktur sosial masyarakat melalui

peningkatan kapasitas manusia dan legitimasi status sosial [27]. Pendidikan tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan praktis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta membentuk cara berpikir yang kritis dan kreatif yang penting dalam kehidupan sosial dan profesional [28]. Pendidikan yang terbatas pada penguasaan materi akademik tanpa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial, cenderung tidak cukup efektif dalam membekali individu untuk menghadapi dinamika dunia kerja dan kehidupan sosial yang terus berubah [29]. Oleh karena itu, kurikulum perlu disusun secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks kehidupan nyata, serta didukung oleh pendekatan pembelajaran yang aktif dan melibatkan partisipasi siswa [30].

Peran guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan juga harus diperkuat melalui pelatihan dan dukungan yang memadai, agar mereka mampu menerapkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan zaman [31]. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang mampu mendorong perubahan struktural dalam masyarakat, khususnya dalam menciptakan peluang yang lebih adil bagi berbagai lapisan sosial [32]. Dalam konteks mobilitas sosial, pendidikan berperan sebagai pintu gerbang bagi individu untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi [3]. Sebagai contoh, seseorang yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dapat meningkatkan status sosialnya melalui pencapaian pendidikan yang tinggi dan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik [33].

Pendidikan berfungsi sebagai penghubung antara individu dan akses menuju pekerjaan profesional, sumber

daya ekonomi, serta jaringan sosial yang lebih luas [3]. Selain membuka peluang untuk peningkatan status sosial, pendidikan juga memberikan legitimasi terhadap status yang diraih seseorang [34]. Gelar akademik dan sertifikat pendidikan kerap dijadikan indikator keahlian dan kompetensi oleh masyarakat maupun lembaga formal [35]. Pengakuan resmi ini memperkuat kedudukan sosial individu dan mempermudah akses ke posisi-posisi strategis di berbagai bidang, seperti pemerintahan, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan [36]. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membekali individu dengan keterampilan teknis, tetapi juga berfungsi sebagai simbol sosial yang memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat [37]. Efektivitas pendidikan sebagai jalur mobilitas sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi [38].

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Sosial

Faktor penentu mobilitas sosial di antaranya adalah latar belakang keluarga, lokasi geografis, kebijakan negara, serta norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Faktor letak geografis memberikan pengaruh terhadap mobilitas sosial yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah pedesaan atau wilayah terpencil [39]. Ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah ini menyebabkan perbedaan dalam kesempatan, yang secara langsung memengaruhi tingkat mobilitas sosial di berbagai daerah [40] [41]. Ketidakseimbangan pembangunan tersebut dapat memperbesar kemungkinan tergeserkannya kelompok

masyarakat di wilayah kurang berkembang, sehingga memperkuat ketidaksetaraan dalam struktur sosial [42].

Keluarga dengan sumber daya ekonomi dan budaya yang memadai lebih mungkin menciptakan peluang mobilitas bagi keturunannya [43]. Memahami faktor-faktor tersebut sangat penting untuk mengenali hambatan dan peluang dalam proses mobilitas sosial serta merancang kebijakan yang dapat mendorong kesetaraan dan keadilan sosial [44]. Salah satu faktor utama yang memengaruhi mobilitas sosial adalah tingkat pendidikan, yang berfungsi sebagai alat paling efektif untuk membuka akses ke pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu hambatan utama adalah ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas [45]. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, tinggal di wilayah terpencil, atau termasuk dalam kelompok marjinal sering kali mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan kelompok sosial lainnya [46]. Kendala seperti minimnya fasilitas pendidikan, kekurangan guru yang kompeten, serta tingginya biaya pendidikan menjadi faktor penghambat dalam proses peningkatan status sosial [47]. Akibatnya, alih-alih menjadi alat pemerataan, pendidikan justru berisiko memperkuat kesenjangan sosial jika tidak ditopang oleh kebijakan yang adil dan menjangkau semua kalangan [48].

Selain pendidikan, faktor penting yang memengaruhi mobilitas sosial adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan penghasilan yang stabil dan prospek karier yang jelas, memberikan peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial-ekonominya [49]. Namun, kenyataannya struktur kerja sering kali tidak sepenuhnya adil. Praktik diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau latar belakang sosial, serta dominasi sistem kerja informal

yang tidak menjamin perlindungan sosial, dapat membatasi peluang mobilitas bagi kelompok tertentu [50]. Ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan mobilitas sosial yang setara bagi semua kalangan [48]. Masyarakat yang masih didominasi oleh praktik nepotisme atau sistem patron-klien, peluang mobilitas sosial menjadi lebih terbatas bagi mereka yang tidak memiliki koneksi atau akses ke jaringan kekuasaan [51]. Hal semacam ini membentuk struktur sosial yang cenderung tertutup, di mana status sosial lebih sering diwariskan daripada diraih melalui pencapaian pribadi.

D. Ketimpangan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial

Ketimpangan pendidikan di Indonesia secara inheren merefleksikan ketimpangan struktural yang lebih luas dalam tatanan sosial yang ada [52]. Akses terhadap pendidikan berkualitas cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, terutama di perkotaan, sementara daerah lain, khususnya perdesaan dan daerah terpencil, mengalami defisit signifikan. Kekurangan ini meliputi infrastruktur pendidikan yang memadai, ketersediaan tenaga pendidik profesional yang berkualitas, serta kualitas kurikulum yang relevan dan mutakhir. Kondisi ini secara eksponensial memperbesar disparitas antara kelompok sosial, menciptakan jurang yang dalam. Pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai katalisator mobilitas sosial justru memperkuat stratifikasi sosial yang sudah ada. Ironisnya, hal ini menjadikan pendidikan berubah peran sebagai pemicu ketidakadilan, bukan sebagai sarana pemerataan kesempatan.

Dampak jangka panjang dari kesenjangan ini adalah penguatan stratifikasi sosial yang semakin meningkat dalam masyarakat [53]. Individu atau kelompok yang memiliki privilese dalam mengakses pendidikan unggul akan lebih mudah menduduki posisi strategis dalam hierarki sosial dan ekonomi [54]. Sebaliknya, kelompok marjinal cenderung terperangkap dalam sektor pekerjaan informal atau nonproduktif yang kurang menjanjikan. Ketimpangan ini juga bermanifestasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk rendahnya partisipasi politik dari kelompok termarginalkan, kesulitan akses layanan kesehatan yang berkualitas, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Oleh karena itu, pendidikan harus kembali diarahkan ke konsep yang sebenar-benarnya yaitu sebagai hak sosial fundamental yang wajib dijamin oleh negara demi mewujudkan keadilan sosial yang komprehensif dan tidak semata sebagai komoditas layanan yang bisa diperjualbelikan. Ini adalah langkah krusial menuju pembangunan yang inklusif.

Penempatan pendidikan sebagai hak sosial yang dijamin negara merupakan prasyarat esensial untuk mengkonstruksi keadilan sosial yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat [55]. Dengan memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi bagi setiap warga negara, Indonesia dapat secara progresif mengikis adanya jarak pemisah terhadap disparitas yang ada. Upaya ini tidak hanya akan memfasilitasi mobilitas sosial yang lebih dinamis, tetapi juga secara signifikan mengurangi konsolidasi stratifikasi sosial yang kaku. Pada akhirnya, implementasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip ini akan mengantarkan pada terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan egaliter. Ini akan menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan setara untuk mencapai

potensi maksimalnya dan berkontribusi secara penuh bagi bangsa.

E. Kebijakan Pendidikan dan Peranannya dalam Mobilitas Sosial

Kebijakan pendidikan memiliki peran fundamental sebagai instrumen utama dalam memfasilitasi dan mendorong mobilitas sosial vertikal di suatu negara [56]. Melalui berbagai regulasi dan program yang terstruktur, pemerintah berupaya menciptakan akses yang lebih merata terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Misalnya, kebijakan wajib belajar, alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS), serta pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil adalah langkah konkret yang bertujuan mengurangi ketimpangan akses. Ketika pendidikan dapat dijangkau oleh semua, potensi individu dari berbagai strata sosial dapat teraktualisasi, membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan [57]. Hal ini pada gilirannya akan memperluas peluang kerja dan meningkatkan penghasilan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan status sosial mereka. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang inklusif menjadi fondasi utama bagi masyarakat yang lebih adil dan berkesempatan setara [58].

Efektivitas kebijakan pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial tidak luput dari berbagai tantangan kompleks yang perlu diatasi secara serius [59]. Salah satu kendala utama adalah isu kualitas pendidikan yang seringkali tidak merata, di mana sekolah-sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum

yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan atau pinggiran. Disparitas ini diperparah oleh faktor-faktor sosio-ekonomi keluarga, seperti tingkat pendapatan dan pendidikan orang tua, yang secara signifikan memengaruhi dukungan belajar anak di rumah dan akses terhadap sumber daya tambahan. Akibatnya, meskipun kebijakan telah menyediakan akses, kualitas yang timpang dapat menciptakan dilema bagi mobilitas sosial, di mana anak-anak dari latar belakang kurang beruntung tetap kesulitan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu lebih fokus pada pemerataan kualitas komponen pendidikan seperti pendidik baik yang berada di pendidikan formal maupun non formal agar dampak mobilitas sosial benar-benar terasa [60].

Untuk memaksimalkan peran kebijakan pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensional yang melampaui sekadar penyediaan akses fisik [61]. Prioritas harus diberikan pada investasi signifikan dalam peningkatan profesionalisme guru dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan global [62]. Selain itu, kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung dan inklusif. Evaluasi kebijakan disertai dengan data akurat yang berkala dan transparan penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan [63]. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya akan berfungsi sebagai sarana untuk mencerdaskan individu tetapi juga sebagai motor penggerak utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih dinamis, adaptif, dan memberikan

kesempatan setara bagi setiap warga negara untuk maju serta berpartisipasi penuh dalam pembangunan [64].

F. Peluang dan Strategi Mengoptimalkan Peran Pendidikan untuk Mobilitas Sosial

Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan, pendidikan tetap memegang peranan vital sebagai peluang emas untuk mobilitas sosial di Indonesia [65]. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sekalipun masih belum merata, terbukti mampu membekali individu dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat dibutuhkan di pasar kerja modern. Program-program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan sekolah gratis yang digulirkan pemerintah, meskipun dengan segala keterbatasannya, memberikan harapan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan studi [66]. Lulusan dengan kualifikasi pendidikan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang stabil, dan akhirnya mencapai status sosial yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga membuka wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan membangun jaringan sosial yang luas, yang semuanya merupakan modal penting untuk kemajuan personal dan profesional. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi diri sepenuhnya, mengatasi batasan lingkungan, dan menjadi agen perubahan bagi diri sendiri maupun komunitasnya [67]. Pendidikan pada dasarnya menawarkan janji transformasi yang fundamental.

Usaha untuk mengoptimalkan peran pendidikan sebagai pendorong mobilitas sosial memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak [68]. Pemerintah perlu memprioritaskan pemerataan kualitas

pendidikan melalui peningkatan investasi infrastruktur, pengembangan profesionalisme guru, dan penyusunan kurikulum yang adaptif di seluruh wilayah. Peningkatan anggaran untuk program bantuan pendidikan yang tepat sasaran dan skema beasiswa yang lebih inklusif harus terus digalakkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, kolaborasi erat antara sekolah, keluarga, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong motivasi siswa. Pengembangan pendidikan vokasi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal juga dapat menjadi jalur alternatif bagi mobilitas sosial, terutama di daerah yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi [69]. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya akan mempersiapkan individu untuk pekerjaan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkesempatan [70]. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih sejahtera.

Mobilitas sosial merupakan salah satu cerminan paling krusial mengenai bagaimana struktur masyarakat memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kondisi hidup dan status sosial mereka secara signifikan. Dalam konteks ini, pendidikan seringkali diyakini sebagai jalur utama yang paling efektif untuk mengantarkan seseorang menuju kehidupan yang jauh lebih baik dan prospektif. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu memiliki kesempatan emas untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan esensial, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan mendapatkan pengakuan formal yang kemudian membuka akses luas